



ANALISIS KEWAJARAN BENCHMARKING PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Endang Natania Simanjuntak^{1)*}; Wahyu Pamungkas²⁾; Yudit Yuditama³⁾; Suparna Wijaya⁴⁾

¹⁾ 2301190278_endang@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190424_wahyu@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 2301190536_yudit@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*penulis korespondensi

Abstract

From year to year, the company's competence to compete in the business world is growing. At the beginning of 2020, the Covid-19 pandemic began which became one of the challenges for every company in order to maintain their business and keep growing. Almost all sectors of the economy were affected. One of them is in the financing sector. Financial institutions function to improve the welfare of the community by providing return fund facilities that continue to benefit business actors. To measure the ability of finance companies, one of which is PT Clipan Finance Tbk, in obtaining optimal profits, it can be done by measuring its profitability. By comparing each ratio with the benchmark according to Circular 68/PJ/2020, it can be found that the ratios have differences for further investigation of the fairness of the financial statements and the presence or absence of red flags in the financial records of PT Clipan Finance. From the results of calculating the ratio and its comparison with the attached benchmark, there are ratios below or above the benchmark, one of which is the Covid-19 pandemic. In 2019, most of the ratios were close to even above the benchmark. However, starting in 2020, rising costs and declining sales due to the Covid-19 pandemic caused its profitability ratio to decline.

Keywords: benchmark, ratio, PT Clipan Finance, pandemic, covid-19

Abstrak

Dari tahun ke tahun, kompetensi perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis semakin berkembang. Pada awal tahun 2020, mulai terjadi masa pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu tantangan untuk tiap perusahaan demi mempertahankan bisnisnya dan tetap berkembang. Hampir semua sektor perekonomian terkena dampaknya. Salah satunya pada sektor pembiayaan. Lembaga pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dana imbal hasil yang tetap menguntungkan pelaku usaha. Untuk mengukur kemampuan perusahaan pembiayaan, salah satunya PT Clipan Finance Tbk, dalam memperoleh laba secara optimal, bisa dengan mengukur profitabilitasnya. Dengan membandingkan setiap rasio dengan *benchmark* sesuai Surat Edaran 68/PJ/2020, bisa ditemukan rasio yang memiliki perbedaan untuk diteliti lebih lanjut kewajaran laporan keuangannya serta ada tidaknya *red flag* dalam laporan catatan keuangan PT Clipan Finance. Dari hasil penghitungan rasio serta perbandingannya dengan *benchmark* yang dilampirkan, terdapat rasio-rasio yang terdapat di bawah maupun di atas *benchmark* yang salah satu penyebabnya merupakan pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, sebagian besar rasio mendekati bahkan di atas *benchmark*. Akan tetapi, mulai tahun 2020, biaya yang meningkat serta penjualan yang menurun akibat pandemi Covid-19 menjadikan rasio profitabilitasnya menurun.

Kata Kunci: benchmark, rasio, PT Clipan Finance, pandemi, covid-19

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan yang memiliki kompeten cukup merupakan kelebihan agar mampu bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis yang semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Setiap perusahaan berkewajiban mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien agar dapat menjaga kestabilan perusahaan terutama dari segi keuangan yaitu pencapaian laba maksimal sesuai target dan terhindar dari kerugian yang dapat berdampak pada para investor perusahaan. Masa pandemi Covid-19 salah satu tantangan setiap perusahaan untuk bertahan dan berkembang dengan setiap keterbatasan khususnya keuangan perusahaan yang melambat akibat pandemi Covid-19. Salah satu perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu indikator penting pada perekonomian suatu masyarakat namun masih cukup awam bagi masyarakat istilah lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dalam pengadaan barang baik itu perusahaan pembiayaan non-bank dan perusahaan *multifinance*. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang lebih luas dari lembaga keuangan antara lain alternatif dalam mendapatkan dana, menunjang perekonomian nasional



dan memiliki peran penting bagi pembangunan. Salah satu fungsi dari lembaga pembiayaan antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dana imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha.

Selama pandemi Covid-19, perusahaan pembiayaan harus menjaga arus kas dan meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* harus menjadi perhatian perusahaan pembiayaan karena bersifat fluktuatif dan tidak pasti. Piutang pembiayaan Juni 2020 mengalami penurunan 8,77% yoy menjadi Rp 405,56 triliun, nilai NPF 2,66% dan NPF Netto 0,43%. Hal ini disebabkan karena perusahaan pembiayaan lebih hati-hati memberikan pembiayaan kepada masyarakat (debitur) dengan beranggapan kurangnya kemampuan kemampuan membayar oleh debitur. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan sehingga melalui analisis *benchmarking* dapat menjelaskan kaitan tersebut. Dari 10 emiten *multifinance* yang mempunyai kapasitas terbesar terdapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk dengan kinerja positif dibandingkan kinerja IHSG secara *year to date*. PT Clipan Finance merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang leasing yang memberikan jasa pembiayaan konsumen. (Tarigan, Wantoro, & Setiawansyah, 2020). Perusahaan merupakan bagian dari Panin Group yang induk utamanya adalah PT. Panin Investment.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation pada 15 Januari 1982. Pada masa awal pendiriannya, PT Clipan Finance merupakan suatu perusahaan patungan yang mana pemegang sahamnya terdiri dari Credit Lyonnais dari Perancis sebagai Pemegang Saham mayoritas dan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank). Setelah delapan tahun berdiri, pada 17 Mei 1990 Perseroan memutuskan untuk melakukan perubahan nama dari semula PT Clipan Leasing Corporation menjadi PT Clipan Finance Indonesia.

Setelah melakukan pergantian nama, kemudian Perseroan tercatat sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang go-public di Indonesia. Hal tersebut karena perusahaan melakukan aksi korporasi berupa IPO (Initial Public Offering) yang terjadi pada 27 Agustus 1990. Perseroan resmi melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang kini bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Seiring perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka (PT), Perseroan kembali berganti nama menjadi PT Clipan Finance Indonesia Tbk, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 147 tanggal 30 Agustus 1996.

PT Clipan Finance dalam kegiatan operasi perusahaannya menyediakan produk dan layanan pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Dalam melakukan kegiatan operasi tersebut, Clipan Finance memiliki strategi usaha yang terarah yang senantiasa mengacu pada prinsip kehati-hatian, ditunjang oleh struktur permodalan yang kuat dan jaringan usaha yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Clipan Finance juga didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional dengan sistem teknologi yang canggih dan terintegrasi, serta penerapan praktik manajemen risiko yang baik¹.

Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan pembiayaan khususnya PT Clipan Finance Indonesia Tbk yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam bentuk modal oleh perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Komponen dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan antara lain *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*. Rasio ini akan menghasilkan efektifitas aktivitas kegiatan suatu perusahaan untuk mendapatkan pendapatan.

Kinerja PT Clipan Finance Indonesia Tbk dinilai dari kemampuan melaksanakan kegiatan operasional pembiayaan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajiban. Hal

¹ [Media Informasi Kinerja Perusahaan Indonesia - Annual Report ID](#)



ini dapat diamati dengan melakukan analisis benchmarking pada perusahaan PT Clipan Finance Indonesia Tbk untuk menilai kewajaran setiap pos-pos laporan keuangan, menilai adanya red flag dan membandingkan dengan perusahaan sejenis di masa sebelum dan saat terjadinya pandemic Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dan membandingkan setiap rasio dengan benchmark sesuai Surat Edaran 68/PJ/2020 sehingga diperoleh pembandingan yang sesuai dan tidak sesuai persentase yang seharusnya untuk dapat diteliti lebih lanjut dalam gali potensi pajak. Adapun tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui analisis benchmark sesuai SE-68/PJ/2020 terhadap rasio keuangan PT Clipan Finance Indonesia Tbk selama tahun 2019 s.d 2021; dan (2) Mengetahui PT Clipan Finance Indonesia Tbk memiliki *red flag* dalam laporan keuangan tahun 2019 s.d 2021.

Penelitian terdahulu terkait analisis benchmark adalah Syafi'i (2013) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja operasional PT Semen Gresik (Persero) Tbk masih di bawah benchmark. Rasio input lain terhadap penjualan merupakan proporsi yang paling rendah di bawah benchmark. Penelitian lain dilakukan Fani (2014) yang menunjukkan bahwa Rasio Biaya operasional yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan standar benchmark dan Rasio penghasilan luar usaha neto yang dimiliki perusahaan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan standar benchmark.

LANDASAN TEORI

Benchmarking DJP

Benchmarking dalam dunia bisnis merupakan suatu proses yang sistematis dalam membandingkan suatu produk, layanan, atau praktik suatu organisasi terhadap pesaing atau pemimpin industri untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi (Sarjono, 2014). Dalam melakukan benchmarking, suatu organisasi akan membandingkan suatu nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding dengan tujuan menentukan langkah-langkah yang sistematis dan terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Forum PDAM Indonesia, 2008 dalam Syafi'I, 2013) .

Dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadopsi model benchmarking untuk membina wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Anonim, 2014). Benchmarking yang dilakukan oleh DJP dapat disebut sebagai total benchmarking. Rasio Total Benchmarking adalah proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak (Damayanti & Adiritonga, 2011).

Dengan melakukan benchmarking, diharapkan DJP dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, 2009). Hasil analisa rasio dibandingkan dengan benchmark yang telah ditetapkan, tidak dapat dijadikan sebagai acuan utama yang menginterpretasikan kepatuhan wajib pajak sepenuhnya. Hal tersebut karena bisa saja memang kondisi asli di lapangan memang seperti apa yang ditunjukkan hasil benchmark yang mana berasal dari perbedaan proses bisnis, ataupun hal lain.

Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak (Fani, 2014). Hasil benchmark dapat menjadi suatu alarm bagi DJP dalam melaksanakan



pengawasan kepada wajib pajak. Jika terdapat kemungkinan indikasi ketidakpatuhan dapat dilakukan tindakan pemeriksaan yang mana hasilnya adalah SKP.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya disebutkan bahwa Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha;
- b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan;
- c. Ada keterkaitan antar rasio benchmark;
- d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Rasio merupakan alat yang penting dalam melakukan analisa laporan keuangan. Rasio (%) digunakan untuk mengkonversi angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam bentuk yang lebih layak untuk diperbandingkan dengan data tahun-tahun lainnya untuk satu wajib pajak (vertikal) ataupun dibandingkan antar wajib pajak dalam bidang industri tertentu (horizontal). Rasio bisa lebih menggambarkan posisi satu wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak lainnya dalam satu industri yang sama dibandingkan dengan angka-angka rupiah laporan keuangan. Secara umum, analisa rasio akan berguna untuk

- a. memahami kinerja satu industri;
- b. membandingkan kinerja perusahaan (wajib pajak) dengan benchmark-nya;
- c. melakukan komparasi dengan tahun-tahun lainnya;
- d. membantu dalam menentukan tingkat risiko ketidakpatuhan di wajib pajak.

Benchmarking seringkali menjadi pintu masuk oleh Account Representative dalam menilai tingkat kewajaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Rasio-rasio yang digunakan DJP dalam total benchmarking sebagai berikut:

- a. Rasio Kinerja Operasional
 - i. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;
 - ii. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan;
 - iii. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan;
 - iv. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan;
 - v. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan;
 - vi. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
- b. Rasio PPN
 - i. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang;
- c. Rasio Input
 - i. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
 - ii. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
 - iii. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
 - iv. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
 - v. Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan;



- d. Rasio aktivitas luar usaha
 - i. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
 - ii. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu kejadian yang terjadi dengan hasil penelitian lebih menekankan pada interpretasi dari pada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian untuk selanjutnya dapat ditelaah lebih lanjut (Hermawan, 2019). Dalam metode studi kepustakaan, data diperoleh dari peraturan perundang–undangan, jurnal atau penelitian ilmiah, artikel, berita, laporan keuangan, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi terkait penelitian. Keseluruhan informasi yang didapatkan merupakan data sekunder yang berarti data yang didapatkan dari sumber lain yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Benchmark terhadap rasio keuangan PT Clipan Finance Indonesia Tbk tahun 2019 s.d 2021

Penentuan nilai benchmarking menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 68/PJ/2010 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya yang didalamnya terdapat beberapa rasio keuangan yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas beberapa usaha dengan pengklasifikasian usaha sejenis. Dalam melakukan benchmarking menggunakan angka acuan sebagai pembanding menggunakan jenis usaha perusahaan pembiayaan konsumen dengan kode KLU 65922.

Gambar 1 – Angka acuan benchmarking																				
30	65922	Pembiayaan konsumen (customers credit)	100.00 %	47.26 %	31.23 %	12.26 %	18.97 %	0.00%	0.01%	12.63 %	2.17%	1.53 %	6.72 %	0.44 %	16.47 %	28.19 %	0.00 %	94.82%	94.82%	94.82%
Sumber: SE - 68/PJ/2010																				

Benchmarking dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio yang ada. Dalam menghitung rasio tersebut, data berasal dari laporan keuangan PT Clipan Finance, termasuk catatan atas laporan keuangannya. Hasil dari penghitungan adalah sebagai berikut:

Gambar 2 – penghitungan benchmark



Rasio	2019		2020		2021	
	341.654.648		315.842.691		294.350.364	
biaya gaji	2.164.270.850	15,79%	1.847.954.150	17,09%	1.472.263.820	19,99%
	637.488.333		561.227.120		308.251.284	
biaya bunga	2.164.270.850	29,46%	1.847.954.150	30,37%	1.472.263.820	20,94%
	15.103.236		6.774.440		7.220.951	
biaya sewa	2.164.270.850	0,70%	1.847.954.150	0,37%	1.472.263.820	0,49%
	28.188.814		41.723.697		42.965.189	
biaya penyusutan	2.164.270.850	1,30%	1.847.954.150	2,26%	1.472.263.820	2,92%
	156.928.132		116.968.284		105.269.877	
input antara	2.164.270.850	7,25%	1.847.954.150	6,33%	1.472.263.820	7,15%
	367.501.712		280.604.992		395.378.045	
penghasilan luar usaha	2.164.270.850	16,98%	1.847.954.150	15,18%	1.472.263.820	26,86%
	498.633.135		744.884.756		675.895.824	
biaya luar usaha	2.164.270.850	23,04%	1.847.954.150	40,31%	1.472.263.820	45,91%
	1.117.530.250		606.448.460		338.923.000	
OPM	2.164.270.850	51,64%	1.847.954.150	32,82%	1.472.263.820	23,02%
	2.154.183.940		1.831.895.470		1.464.625.210	
GPM	2.164.270.850	99,534%	1.847.954.150	99,131%	1.472.263.820	99,48%
	486.666.547		60.533.160		39.694.720	
PPM	2.164.270.850	22,486%	1.847.954.150	3,276%	1.472.263.820	2,70%
	125.070.527		13.966.458		6.611.379	
CTTOR	2.164.270.850	5,779%	1.847.954.150	0,756%	1.472.263.820	-0,45%
	361596020		46566702		46306100	
NPM	2.164.270.850	16,708%	1.847.954.150	2,520%	1.472.263.820	3,145%
	545.608		236.782		545.411	
PPN	2.164.270.850	0,025%	1.847.954.150	0,013%	1.472.263.820	0,037%

Sumber: diolah penulis dari laporan keuangan PT Clipan Finance 2019-2021

Rasio Gross Profit Margin (GPM)

Rasio GPM merupakan perbandingan antara gross margin dengan total penjualan tahun yang berkaitan untuk menghitung kesebandingan laba bruto PT Clipan Finance dengan perusahaan yang sejenis. Hasil analisis ini akan melihat apakah *gross profit* perusahaan yang bersangkutan sebanding dan wajar. Semakin tinggi nilai rasio GPM maka semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam efektivitas hasil produk. Jika dilihat dari rincian data perhitungan GPM maka PT Clipan Finance memiliki rasio tertinggi pada tahun 2019 sebesar 99,53% dengan laba kotor Rp2.154.183.940.000 yang merupakan total pendapatan di tahun 2019, 99,53% berhasil dikonversi menjadi laba kotor. Rasio tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berada di bawah Benchmark DJP.

Operating Profit Margin (OPM)

Operating Profit Margin merupakan perbandingan yang digunakan untuk menghitung persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi nilai rasio OPM, semakin baik kemampuan suatu perusahaan dalam meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional. Rasio OPM tertinggi berada pada tahun 2019 sebesar 51,64%.

Pretax Profit Margin (PPM)

Pretax Profit Margin merupakan perbandingan laba bersih sebelum pajak dengan total penjualan suatu perusahaan. Nilai PPM yang semakin besar menunjukkan semakin tinggi tingkat laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun kegiatan lainnya. Berdasarkan data yang disajikan, rasio PPM tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu 22,48%. Rasio PPM tahun 2019 s.d tahun 2021 berada dibawah benchmark.

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)

Corporate Tax to Turn Over Ratio merupakan perbandingan pajak penghasilan yang terutang dengan total penjualan. Semakin tinggi nilai rasio CTTOR maka semakin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan. Rasio CTTOR tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu 5,78% dengan kondisi tahun 2021 proporsi



hasil penjualan perusahaan sangat rendah untuk digunakan dalam membayar pajak penghasilan. Seluruh rasio CTTOR tahun 2019 s.d tahun 2021 berada dibawah benchmark.

Rasio sewa terhadap penjualan

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap Penjualan. Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Berdasarkan data yang disajikan, rasio NPM tertinggi berada pada tahun 2019 dengan nilai 16,7%. Rasio dari tahun 2019 sampai 2021 berada di bawah benchmark.

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR ini bisa menunjukkan tingkat kematangan suatu perusahaan. Perusahaan PT Clipan Finance memiliki nilai DPR 0% dari tahun 2019-2021 karena perusahaan ini tidak membayarkan dividen. Pada tahun tersebut, perusahaan tidak memiliki dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nilai ini juga sudah sesuai dengan benchmarknya.

Rasio PPN masukan terhadap penjualan merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antarcabang. Pada tahun 2019, PT Clipan Finance memiliki rasio PPN tertinggi pada tahun 2021 yaitu sejumlah 0,37%. Dari tahun 2019 sampai 2021 rasionya di atas benchmark.

Rasio biaya gaji terhadap penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2021 dengan nilai rasio 19,99%. Dari tahun 2019-2021 nilai rasionya di atas benchmark. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada beban imbalan pasca kerja mengalami kenaikan sebesar 60,7% yang disebabkan berkurangnya jumlah karyawan sehingga meningkatkan pembayaran imbalan pasca kerja. Beban imbalan pasca kerja mengalami penurunan 88,39% karena dampak penerapan UU Cipta Kerja yang diterapkan pada tahun 2021.

Rasio biaya bunga terhadap penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap penjualan. Pada tahun 2019-2021 nilai rasionya berada di atas benchmark karena tiap tahun bunga terhadap bank mengalami penurunan.

Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya sewa terhadap penjualan, makin besar nilai rasionya maka makin besar pula nilai penjualan yang diperoleh untuk menutupi biaya sewa. Berdasarkan penghitungan, rasio sewa terhadap penjualan dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan memang terjadi perubahan transaksi sewa yang terjadi. Selain itu, rasio sewa terhadap penjualan berada di bawah benchmark DJP. Hal ini dapat karena perusahaan lebih memilih untuk menggunakan aset pribadinya daripada melakukan sewa.

Rasio penyusutan terhadap penjualan

Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya penyusutan terhadap penjualan, makin besar rasionya makin besar juga biaya penyusutan yang ditanggung nilai penjualan. Komponen biaya penyusutan ini adalah semua beban yang timbul karena penurunan nilai buku suatu aset, yaitu beban penyusutan dan amortisasi aset. Dalam tiga tahun terakhir, biaya penyusutan selalu mengalami kenaikan. Dengan kenaikan biaya penyusutan dengan dibarengi angka penjualan yang menurun, menyebabkan rasio biaya penyusutan terhadap penjualan semakin meningkat. Kenaikan biaya penyusutan tidak dibarengi dengan kenaikan aset dan penjualan. Hal tersebut dapat disebabkan karena terjadi penggantian aset yang memiliki umur manfaat yang lebih pendek. Selain itu juga menunjukkan bahwa penggunaan aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan belum cukup efisien.

Rasio input lainnya terhadap penjualan



Rasio ini merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio ini dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi dan nilainya cukup jauh dibandingkan dengan benchmark DJP. Hal tersebut dapat disebabkan karena beban yang dikeluarkan perusahaan memiliki nilai yang besar untuk beban lainnya, seperti beban luar usaha yang terbilang cukup besar seperti yang akan dijelaskan kemudian.

Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan

Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya luar usaha terhadap penjualan. Biaya luar usaha berasal dari: Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan agunan yang diambil alih. Kerugian kurs mata uang asing-bersih, Kerugian penjualan aset tetap, Kerugian direalisasi investasi jangka pendek, Kerugian modifikasi arus kas, dan Beban lain-lain. Dalam tiga tahun rasio ini selalu berada di atas benchmark DJP. Kenaikan biaya luar usaha disebabkan ini terdapat dalam pos kerugian penurunan nilai aset. Dengan rasio yang cukup besar dapat menunjukkan bahwa biaya yang bukan terkait kegiatan operasinya cukup besar dan terkesan kurang efisien.

Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan

Rasio ini merupakan perbandingan antara penghasilan luar usaha terhadap penjualan. Penghasilan luar usaha berasal dari: Pendapatan bunga, Keuntungan kurs mata uang asing – bersih, Keuntungan penjualan aset tetap, dan pendapatan lain-lain. Rasio ini mengalami fluktuasi dalam tiga tahun dan nilainya di atas nilai benchmark. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penghasilan luar usaha merupakan suatu yang insidental dan perlu untuk menjadi perhatian mengingat nilainya cukup tinggi dibanding benchmark DJP.

Red flag dalam laporan keuangan PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan, dimungkinkan bahwa pajak masukan yang telah dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai. Hal ini dibuktikan dengan salah satu rasio pn tahun 2019 yaitu 0,025%. Dengan total pajak pertambahan nilai Rp545.608.000 yang PPN masukannya diasumsikan dikreditkan seluruhnya oleh perusahaan karena jika dibandingkan dengan pendapatan sewa operasi senilai Rp6.723.458.000. Perusahaan dimungkinkan mengkreditkan seluruh PPN masukan padahal dimungkinkan bahwa transaksi PT Clipan Finance Indonesia tersebut terdapat yang terutang dan tidak terutang. Ketika barang yang diserahkan merupakan *specific identification* yang artinya barang tersebut spesifik atau khusus dapat digolongkan terhadap pendapatan tertentu dan berhubungan langsung atau tidak seperti sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen merupakan non-JKP.

Identifikasi PPN Masukan diawali dengan mengidentifikasi barang/jasa kena pajak misalnya barang yang mau dikreditkan merupakan barang modal yang umurnya lebih dari 12 bulan maka Perhitungan kembali yang harus dilakukan selama 4 tahun. Dalam pendapatan PT Clipan Finance Indonesia terdapat jasa tidak kena pajak antara lain sewa pembiayaan (alat-alat berat, tongkang, *tug boat*, mesin-mesin produksi, peralatan dan kendaraan bermotor), pembiayaan konsumen dan anjak piutang sedangkan sewa operasi atas kendaraan bermotor milik perusahaan yang disewakan selama 3 tahun kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan dengan masa manfaat kendaraan bermotor 5-10 tahun. Perhitungan ulang PPN Masukan sebagai berikut.

Aset sewa operasi bersih	21.232.669.000
Masa Manfaat Pajak Masukan	4
	5.308.167.250
Jumlah seluruhnya Pendapatan Sewa Operasi	5.038.845.000



Pendapatan	1.847.954.148.000
	0,002727
jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 tahun	14.473.861

Dalam perbandingan CTTOR dengan PPM ternyata PT Clipan Finance Indonesia memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan benchmark sehingga perlu dianalisis lebih lanjut kompensasi kerugian sebelum menilai adanya indikasi Koreksi Fiskal yang dilakukan lebih rendah atau tinggi dari yang seharusnya. Perhitungan perbandingan CTTOR dengan PPM sebagai berikut.

Tabel 1 – Benchmark CTTOR dan PPM

	WP	Benchmark
CTTOR	5,779	12,26
PPM	22,486	31,23
	25,70%	39,26%

Sumber: diolah penulis

Selain hal tersebut, biaya penyusutan perlu dicermati lebih lagi. Hal ini dikarenakan bahwa biaya dapat berasal dari penurunan nilai aset perusahaan tetap yang tidak bertujuan sebagai aset investasi. Dengan nilai biaya penyusutan yang semakin naik namun nilai aset serta pendapatan menurun perlu diperhatikan apakah terdapat penggelembungan biaya penyusutan. Hal yang wajar jika biaya penyusutan naik dibarengi dengan kenaikan nilai aset karena metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Selain itu, di sisi pendapatan, biaya penyusutan kurang efisien karena biaya penyusutan akan setidaknya seirama dengan pendapatan karena dengan adanya investasi pada pembelian peralatan maka biaya penyusutan naik yang diharapkan bahwa pendapatan akan naik. Bisa jadi biaya penyusutan adalah biaya yang tidak berhubungan dengan 3M sehingga perlu dicermati lebih dalam terkait penghitungan PPh Badan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio laporan keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, wabah pandemi Covid-19 memberikan dampak pada aktivitas dan keuangan perusahaan. Tahun 2019 perusahaan dapat mengolah sumber daya dengan baik yang dilihat dari tingkat pendapatan dan rasio profitabilitas yang mendekati bahkan berada diatas benchmark DJP akan tetapi sejak tahun 2020 yang dimulai dengan pandemi menunjukkan penurunan tingkat pendapatan. Hal ini ditunjukkan dari biaya yang meningkat namun penjualan menurun yang ditampilkan oleh rasio OPM karena perusahaan belum memanfaatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan penjualan yang maksimal. Selain itu, meningkatnya rasio gaji menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan biaya gaji yang lebih besar dari tahun 2019 sehingga ketidakefektifitasan perusahaan dalam manajemen setiap karyawan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.

annualreport.id. (2015). PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. Retrieved from annualreport.id:
<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20CLIPAN%20FINANCE%20INDONESIA,%20Tbk>

Anonim. (2014). 2. LANDASAN TEORI 2.1. Benchmarking 2.1.1. Pengertian ... Retrieved from petra.ac.id:



<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/eakt/2014/jiunkpe-is-s1-2014-32410147-29826-rasio%20-chapter2.pdf>

- Damayanti, T. W., & Adiritonga, E. S. (2011). RATIO TOTAL BENCHMARKING SESUAIKAH DENGAN KONDISI WAJIB PAJAK? (Studi pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI). Retrieved from jurnal.unimus.ac.id: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/download/424/473>
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2009). Rasio Total Benhmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. SE 96/PJ 2009. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Esomar, M. J. (2021). Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi Vol. 2, No. 2 April 2021, 22-29.
- Fani, F. D. (2014). ANALISIS PERBANDINGAN RASIO TOTAL BENCHMARKING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP RASIO KEUANGAN INDUSTRI ROKOK UNTUK PERIODE 2009-2012. Retrieved from repository.ibs.ac.id: <http://repository.ibs.ac.id/693/>
- Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan mixed mehode. Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan.
- Martono, C. (2002). ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS INDUSTRI, RASIO LEVERAGE KEUANGAN TERTIMBANG DAN INTENSITAS MODAL TERTIMBANG SERTA PANGSA PASAR TERHADAP “ROA” DAN “ROE” PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO- PUBLIC. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 2, Nopember 2002, 126-140.
- Sarjono, B. (2014). TOTAL BENCHMARKING SEBAGAI ALAT MENILAI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. AKRUAL 6 Volume (1) , 1-16.
- Syafi’i, S. (2013). Rasio Total Benchmarking Sebagai Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk.). WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 3(1), 36655.
- Tarigan, D. P., Wantoro, A., & Setiawansyah. (2020). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT MOBIL DENGAN FUZZY TSUKAMOTO(STUDI KASUS : PT CLIPAN FINANCE). TELEFORTECH Vol. 1, No. 1, 2020, 32-37.
- Turmono, & Mawarto. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Multifinance Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019. Coopetition, Vol XII, Nomor 2, Juli 2021, 189-204.
- Wondal, J., Saerang, D., & Tirajoh, V. (2015). ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN 55 ATAS PENURUNAN NILAI (IMPAIRMENT) PIUTANG PADA PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, 118-128.